



BANTUAN: Ketua Baznas RI menyerahkan bantuan 50 unit bedah rumah bagi fakir miskin yang diserahkan secara simbolis kepada Wakil Gubernur Kalbar, H Ria Norsan, Senin (5/12) di Pontianak.

Baznas Salurkan Bantuan dan Pemberdayaan untuk Rakyat

PONTIANAK - Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Republik Indonesia menyerahkan bantuan dan pemberdayaan bagi mustahik di Kalbar. Bantuan berupa 50 unit bedah rumah tidak layak huni (RTLH) untuk fakir miskin akan segera terealisasi di akhir tahun ini.

Bantuan tersebut secara



Potensi ZIS di Kalbar Besar. Untuk memancingnya, kailnya juga harus besar. Pemerintah daerah perlu membantu penguatan Baznas di daerah.

Prof DR Noor Ahmad, MA, Ketua Baznas RI

◆ Ke Halaman 7 kolom 1



Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agust	Sept	Okt	Nov	Des	2022	Hal.: \																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31

Baznas Salurkan Bantuan dan Pemberdayaan untuk Rakyat

Sambungan dari halaman 1

simbolis diserahkan Ketua Baznas Prof Dr. KH Noor Achmad MA kepada Wakil Gubernur Kalbar Drs H Ria Norsan MM, MH dalam kegiatan Pengelolaan Zakat, Infak, dan Sedekah untuk Kemandirian Umat di Kalbar, Senin (4/12) di Hotel Golden Tulip. Kegiatan itu dihadiri para pimpinan Baznas Provinsi Kalbar dan Baznas Kabupaten/Kota se-Kalbar.

Penyerahan bantuan RTLH itu setara Rp.1, 250 miliar. Selain itu, secara simbolis diserahkan juga Baznas Microfinance Desa (100 bantuan usaha setara Rp300 juta), bantuan banjir Sintang Rp46.833.700, dan penyerahan bantuan program pembangunan masjid di Kayong Utara senilai Rp194.000.000 (per 30 November 2022).

Sedangkan dari Baznas Provinsi, diserahkan secara simbolis 100 paket sembako (senilai Rp20 juta) ke fakir miskin di Tambelan Sampit, Pontianak Timur (untuk

Desember). Ada pula bantuan program kemanusiaan gempa bumi di Cianjur senilai Rp.37.344.443, (per tanggal 30 November 2022).

Menurut Noor Achmad, Baznas RI hadir di Kalbar untuk menyemangati para pemimpin baznas, amilin dan amilat serta pemerintah daerah agar tetap berkiprah untuk ikut menyejahterakan umat. "Baznas bukan ormas, namun lembaga resmi pemerintah yang mengelola zakat infak dan sedekah dengan prinsip pengelolaan yang aman syar'i, aman regulasi, dan aman NKRI. Baznas dibentuk berdasarkan undang-undang," kata Noor Achmad.

Menurutnya, potensi ZIS di Kalbar besar. Bukan hanya miliaran, tapi bisa mencapai triliunan rupiah. Oleh karena itu, dukungan besar dari pemerintah daerah sangat diharapkan.

"Untuk memancingnya, kailnya juga harus besar. Pemerintah daerah perlu membantu penguatan baznas di daerah," ujarnya.

Wakil Gubernur Kalbar, Ria Norsan mengatakan akan memperhatikan bantuan hibah untuk baznas, baik untuk baznas provinsi maupun kabupaten/kota. Dia menyadari alokasi anggaran untuk baznas masih kecil dibandingkan kontribusi baznas yang besar dalam menyejahterakan umat.

"Untuk Baznas Provinsi, mudah-mudahan anggaran bantuan tahun depan dapat meningkat. Begitu pula jika ada kabupaten yang belum dapat bantuan, segera akan ditelepon bupatinya agar membantu baznas," ujar Norsan.

Ketua Baznas Kalbar Uray M Amin ST menyebutkan sudah banyak bantuan dan pemberdayaan yang disalurkan baznas untuk menyejahterakan umat. Karena itu, pihaknya perlu mendapat dukungan dari pemerintah daerah. "Mudah-mudahan tahun berikutnya bantuan dari APBD bisa lebih besar agar kami lebih banyak lagi berbuat untuk umat di Kalbar ini. Membantu mengen-

taskan kemiskinan," katanya.

Seperti diketahui, amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, penguatan kelembagaan baznas di daerah telah didukung oleh Kementerian Dalam Negeri melalui Surat Edaran Nomor 420.12/4456/SJ tanggal 20 Agustus 2021. Surat yang ditandatangani Sekjen Kemendagri, Dr. Ir Muhammad Hudori MSi itu intinya meminta pemerintah daerah mengalokasikan anggaran APBD dalam bentuk hibah sesuai ketentuan perundang-undangan.

Pemda juga diminta melakukan penguatan sarana dan prasarana pendukung operasional baznas provinsi dan kabupaten/kota seperti kantor, internet, komputer, mebel, dan lain-lain. Pemda pun diminta melakukan penguatan jaringan basnas provinsi dan kab/kota melalui pembentukan UPZ pada OPD, badan usaha milik daerah (BUMD), kecamatan, kelurahan dan perusahaan swasta di daerah. **(krl)**